



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI SOSIALISASI PERSYARATAN
PEMBUATAN KEPUTUSAN (SK) PADA SUB BIDANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
JABATAN FUNGSIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DISUSUN OLEH :

JOSHUA ADINUGRAHA SIHOMBING, S.STP

A1/23

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI PURNA PRAJA IPDN ANGKATAN XXV**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BOGOR**

2019

DESKRIPSI SINGKAT

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis mengambil judul "OPTIMALISASI SOSIALISASI INFORMASI PERSYARATAN PEMBUATAN KEPUTUSAN (SK) PADA SUB BIDANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN". Adapun yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul tersebut adalah dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi mengenai persyaratan pembuatan keputusan (SK) pada Jabatan Fungsional serta pembaharuan informasi yang jelas bagi pegawai fungsional. Akibat kurangnya informasi persyaratan kepengurusan administrasi pada jabatan fungsional tersebut menyebabkan terhambatnya proses berkas fungsional yang kekurangan atau tidak sesuainya berkas sesuai aturan yang berlaku. Adapun identifikasi isu yang diangkat dalam aktualisasi ini adalah 1) Belum optimalnya penataan naskah / arsip jabatan fungsional 2) Belum optimalnya pengadministrasian surat masuk dan surat keluar 3) Belum optimalnya sosialisasi persyaratan pembuatan keputusan (SK) pada sub bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional.

Setelah melalui proses USG, penulis mengangkat isu tentang Belum optimalnya sosialisasi persyaratan pembuatan keputusan (SK) pada sub bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pelaksanaannya, penulis menjalankan kegiatan aktualisasi di sub bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi aktualisasi ini melalui 6 (enam) kegiatan yaitu : 1) Membuat telaah staf; 2) Mengumpulkan data persyaratan pembuatan keputusan di dalam Jabatan Fungsional; 3) Melakukan penginputan data persyaratan pembuatan keputusan (SK) Jabatan Fungsional pada website resmi BKD; 4) Menyampaikan informasi persyaratan Jabatan Fungsional pada website resmi; 5) Melakukan update data informasi terkait Jabatan Fungsional pada website; 6) Melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilakukan apakah telah berjalan dengan baik atau terdapat hambatan. Adapun saran dari penulis, pentingnya update informasi dapat dengan mudah dilakukan terkait perubahan peraturan pada jabatan fungsional serta pemahaman bagi petugas penerima berkas untuk mengecek setiap kelengkapan berkas sebelum diterima.